JAP

Jurnal Administrasi Publik

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

Volume 15 | Nomor 2 | Desember 2024

MENGKRITISI PREDIKAT PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA SEBAGAI PROVINSI TERMISKIN DI PULAU JAWA

Ane Permatasari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
anepermatasari@umy.ac.id

ABSTRACT

Based on data released by the Central Bureau of Statistics, Yogyakarta Special District Province (hereinafter called DIY Province) is categorized as the poorest province on the island of Java with a poverty rate of 12.8% well above the national figure of 10.6%. Without intending to ignore the data, this study is intended to criticize the prejudice received by DIY Province because at the same time DIY Province is ranked as the province with the longest life expectancy and the highest happiness index compared to other provinces in Indonesia. The method used is a qualitative research method with data collection techniques using documentation techniques that are then analyzed with content analysis methods that are cross-checked with interviews. Based on the results of research found that there are cultural values in DIY province that make the poverty indicators used by BPS need to be perceived more widely

Keywords; Poverty, Life Expectancy, Happiness Index, Multidimensionality

A. PENDAHULUAN

Saat ini, kemiskinan berkembang menjadi masalah pembangunan dengan banyak aspek dan bersifat multidimensi. Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan Sekda DIY menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan antara penduduk lokal dan pendatang sangat besar. Sebagian besar perbedaan pengeluaran ini difokuskan pada produk tersier: makanan jadi, sewa rumah, dan barang gaya hidup seperti perawatan kecantikan dan kesehatan. Salah satu penyebab ketimpangan yang tinggi di Provinsi DIY adalah ketimpangan pengeluaran ini. Selain itu, kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak dapat memenuhi semua kebutuhan dasar mereka. Kemiskinan diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terbagi menjadi dua jenis: kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan dasar dan kemiskinan dalam memenuhi kebutuhan tambahan (Hendra, 2010).

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

Kedua, kemiskinan relatif sendiri tidak memiliki batas kemiskinan yang begitu jelas. Sebagai pemahaman misalnya terdapat seseorang yang menghuni di kawasan elit, yang sebenarnya memiliki penghasilannya yang dianggap cukup dalam memenuhi kebutuhan minimum, namun penghasilannya tersebut masih jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan masyarakat sekitarnya. Pada dasarnya, kemiskinan ini lebih banyak ditentukan oleh faktor lingkungan di sekitarnya. Secara konseptual, kemiskinan mengacu pada kepemilikan materi yang dikaitkan dengan standar kelayakan hidup seseorang atau keluarga. Konsep ini dikenal sebagai kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Istilah ini mengacu pada perbedaan sosial (perbedaan sosial) yang terjadi dalam suatu masyarakat yang didasarkan pada distribusi pendapatan. Perbedaan ini berbeda dengan kemiskinan absolut, yang telah ditentukan sebelumnya melalui garis kemiskinan yang nyata dan atau indikator dan kriteria yang digunakan. Dalam konteks kemiskinan relatif, kategori kemiskinan didasarkan pada perbandingan tingkat kesejahteraan relatif antar individu (Hendra, 2010).

Untuk mengukur kemiskinan secara statis, istilah "kemiskinan absolut" dan "kemiskinan relatif" digunakan. Ada juga kategori lain yang disebut "kemiskinan subjektif", di mana tingkat kemiskinan diukur berdasarkan pendapat seseorang atau rumah tangga itu sendiri. Kelebihan metode ini adalah bahwa pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dengan mudah, yang memungkinkan penyebaran hasil lebih cepat, lebih sering, dan lebih konsisten (Firdausy, 2012). Meskipun demikian, kategori yang terakhir ini tidak diikutsertakan dalam pengukuran kemiskinan yang dilakukan oleh BPS.

Berdasarkan data dari BPS, terdapat 14 kriteria untuk dianggap sebagai keluarga miskin yaitu 1) luas lantai bangunan tempat tinggal yang dihuni kurang dari 8 m2 per orang, 2) jenis lantai bangunan tempat tinggal berasal dari tanah/bambu/kayu murahan, 3) penerangan rumah tangga yang tidak menggunakan listrik, 4) belum adanya fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain, 5) jenis dinding tempat tinggal menggunakan bahan bambu/rimbia/kayu berkualitas rendah/dinding tembok tidak diplester, 6) adanya sumber air minum yang berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan, 7) kayu bakar/arang/minyak tanah digunakan untuk menjadi bahan bakar memasak sehari-hari, 8) mengkonsumsi daging/susu/ayam yang frekuensinya hanya satu kali dalam 1 minggu, 9) hanya membeli satu setel pakaian baru dalam setahun, 10) hanya sanggup

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

makan satu kali/dua kali dalam 1 hari, 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di layanan kesehatan seperti puskesmas, 12) sumber pendapatan kepala rumah tangga sebagai petani yang luas lahannya hanya sekitar 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, atau pekerjaan lain dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan, 13) kepala rumah tangga yang status riwayat pendidikannya tidak sekolah/tidak tamat SD/hanya tamat SD, dan 14) tidak memiliki tabungan/barang mudah dijual dengan nilai Rp500.000 seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya (BPS, 2006). Indikator kemiskinan di atas tentu memerlukan kebijakan pemerintah sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan baik dari aspek ekonomi maupun nonekonomi.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sendiri menggunakan beberapa basis pendekatan utama dalam mengukur garis kemiskinan (poverty line), yaitu seperti pendekatan kebutuhan dasar (basic need approach) dan pendekatan pendapatan (income approach). Pendekatan pendapatan menganggap kemiskinan sebagai akibat dari kurangnya penguasaan aset dan alat produktif seperti tanah, lahan pertanian, dan perkebunan. Di sisi lain, pendekatan kebutuhan dasar menganggap kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang, keluarga, dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum seperti makanan, pakaian, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan air bersih dan sanitasi. Pendekatan pendapatan, di sisi lain, menganggap kemiskinan sebagai hasil dari kurangnya penguasaan oleh individu atas aset dan alat produktif seperti tanah, lahan pertanian, dan perkebunan, yang berdampak pada pendapatan seseorang dalam kehidupan masyarakat.

Untuk menentukan apakah suatu rumah tangga layak atau tidak untuk dianggap miskin, seseorang harus menghitung berbagai faktor, termasuk luas bangunan, jenis lantai dan dinding yang digunakan, fasilitas buang air besar (sanitasi) yang tersedia, sumber air minum yang digunakan, sumber listrik dan penerangan, dan jenis bahan bakar yang digunakan untuk memasak, jumlah makanan yang dibeli setiap minggu seperti susu, daging, dan ayam, jumlah makanan yang dimakan setiap hari, jumlah pakaian baru yang dibeli setiap tahun, akses ke layanan kesehatan seperti puskesmas atau poliklinik, peluang untuk mendapatkan pekerjaan, tingkat pendidikan tertinggi yang dimiliki oleh kepala rumah tangga, dan kepemilikan sejumlah aset, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

Namun, BPS menganggap kemiskinan dalam dua cara. Pertama adalah pendekatan kebutuhan dasar, atau pendekatan kebutuhan dasar, yang menganggap kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan mereka, bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk miskin adalah mereka yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Kedua, pendekatan head count index, yaitu merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Penduduk miskin dapat dianggap sebagai sekumpulan masyarakat yang berada di bawah batas garis kemiskinan, dengan nilai rupiah dari kebutuhan makanan minuman dan nonmakanan minuman. Sehingga, garis kemiskinan terdiri atas dua komponen yang mencakup garis kemiskinan makanan (food line) dan garis kemiskinan nonmakanan (nonfood line) (Kuncoro, 2004).

Garis kemiskinan (poverty line) yang didefinisikan oleh BPS, yaitu besaran nilai rupiah pengeluaran per kapita penduduk yang ada pada setiap periode satu bulan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum mereka, seperti makanan dan nonmakanan yang dibutuhkan agar tetap pada kehidupan yang layak. Sedangkan konsep Garis Kemiskinan (GK) yang dipandang oleh BPS, yaitu penjumlahan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan NonMakanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita setiap bulan berada di bawah garis kemiskinan dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. GKM sendiri merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar nonmakanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan (BPS, 2020).

Secara singkat, kemiskinan hanya didefinisikan sebagai masalah yang menyangkut pendapatan individu, kelompok, komunitas, atau masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Menurut konsep yang dikemukakan oleh United Nations Development Program (UNDP), seseorang dianggap miskin jika tingkat pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Berbagai upaya penanganan kemiskinan di negara berkembang, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

organisasi nonpemerintah, sebagian besar berfokus pada peningkatan pendapatan. Akibatnya, upaya-upaya ini tidak dapat menyelesaikan masalah dan lebih cenderung gagal karena terlalu terfokus pada pendekatan pendapatan (Prayitno, 2010b).

Todaro (1983) menjelaskan bahwa kemiskinan abolut adalah ketika sebuah kelompok orang memperoleh penghasilan di bawah batas minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tingkat kesehatan, pendidikan, dan produktivitas yang rendah akan terjadi di masyarakat tersebut. Ketidakmampuan untuk mengakses dan bersaing dalam bursa lapangan kerja di pasar kerja adalah akibat dari pendidikan yang rendah (Sukirno, 1985).

Untuk melakukan kajian terhadap permasalahan kemiskinan yang ada di Indonesia, sedikitnya terdapat 9 dimensi kemiskinan yang perlu untuk dipertimbangkan yaitu 1) tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, dan perumahan), 2) akses yang rendah terhadap kebutuhan dasar lain seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi yang baik, air bersih, dan transportasi, 3) lemahnya kemampuan untuk melakukan akumulasi kapital, 4) memiliki kerentanan terhadap faktor guncangan eksternal yang memiliki sifat individual maupun massal, 5) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya pengelolaan dan penguasaan sumber daya alam untuk mencapai kesejahteraan, 6) tidak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat, 7) akses yang terbatas pada kesempatan kerja secara berkelanjutan, 8) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun cacat mental, dan 9) ketidakmampuan secara sosial (World Bank, 2020).

Salah satu ukuran yang baik untuk menggambarkan kualitas hidup penduduk suatu negara atau daerah adalah tingkat kemiskinannya. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terus menghadapi masalah kemiskinan, yang menjadi tantangan di tengah kemajuan ekonomi mereka (Pratama, 2014). Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang mana masih cukup banyaknya jumlah penduduk miskin dan perlu diselesaikan sampai saat ini. Pada Maret 2022 tingkat kemiskinan nasional masih berada di angka 9,54 persen meskipun sudah mengalami penurunan dari angka 9,71 persen di tahun sebelumnya.

Sementara itu, menurut data yang dikutip dari BPS pada bulan September 2022, rata-rata tingkat kemiskinan di Provinsi DIY mencapai 11,34 persen dari total penduduk keseluruhan. Angka tersebut menunjukkan yang tertinggi di Pulau Jawa (Gambar 1).

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

Gambar 1. Angka Kemiskinan Provinsi di Indonesia

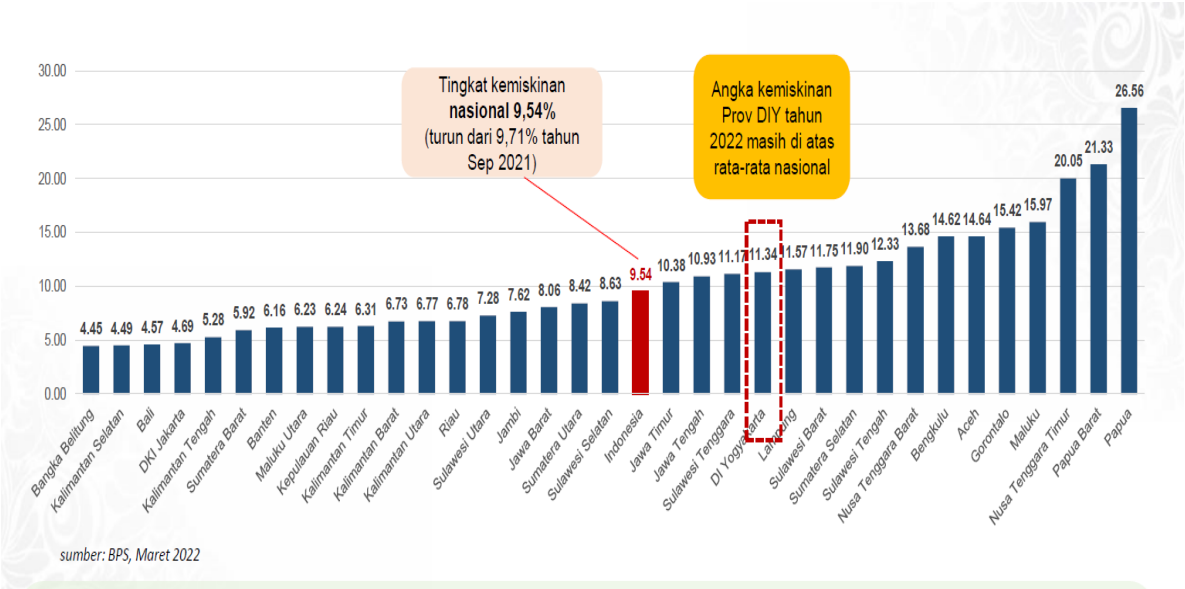

(Sumber: BPS, 2022)

Penghitungan angka kemiskinan yang digunakan BPS tersebut didasarkan pada konsumsi atau pengeluaran masyarakat per kapita pada satu bulan. Sedangkan di tahun yang sama, angka kemiskinan secara nasional berada di angka 9,54 persen dari total penduduk Indonesia. Angka itu masih menempatkan Provinsi DIY sebagai salah satu dari provinsi dengan persentase penduduk miskin di atas rerata nasional, tepatnya berada di urutan ke 12 (Tabel 1).

Tabel 1. Provinsi Termiskin di Indonesia Berdasarkan Data BPS 2023

No.	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin
1.	Papua	26,80%
2.	Papua Barat	21,43%
3.	Nusa Tenggara Timur	20,23%
4.	Maluku	16,23%
5.	Gorontalo	15,51%
6.	Aceh	14,75%
7.	Bengkulu	14,34%
8.	Nusa Tenggara Barat	13,82%
9.	Sulawesi Tengah	12,30%
10.	Sulawesi Selatan	11,95%
11.	Sulawesi Barat	11,92%
12.	Daerah Istimewa Yogyakarta	11,49%

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

No.	Provinsi	Persentase Penduduk Miskin
13.	Lampung	11,44%
14.	Sulawesi Tenggara	11,27%
15.	Jawa Tengah	10,98%

(Sumber: BPS, 2024)

Data mengenai kondisi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini didukung oleh sejumlah penelitian tentang hal tersebut. Sebuah penelitian bahkan menyimpulkan bahwa pada tahun 2023 sampai dengan 2027, garis kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan terus mengalami kenaikan dibanding tahun tahun sebelumnya. (Adrian, 2022)

Banyak penelitian yang meneliti tentang kemiskinan yang ada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian besar penelitian terdahulu ini lebih banyak berfokus pada faktor-faktor penyebab kemiskinan dalam lingkup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Misalnya penelitian dari Rifki Khoirudin dan Muhammad Safar Nasir yang memiliki tujuan untuk mengkaji pengaruh jumlah penduduk, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pengangguran dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi DI Yogyakarta dari tahun 2012 hingga 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan secara bersamaan (Khoirudin, 2022).

Selain itu, upah minimum juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Salsabilla, 2022). Kondisi ini didukung oleh teori upah yang dikemukakan oleh Nurkse dan Malthus, yang mana apabila tenaga kerja diberi upah di bawah upah yang berlaku maka juga akan mempengaruhi terhadap berkurangnya tabungan dan kemakmuran (Nurkse,1964). Kemudian ada faktor lain yang berkontribusi cukup besar terhadap kemiskinan di Provinsi DIY yaitu sektor pangan. Sektor ini memberikan dampak kemiskinan yang lebih besar dibandingkan sektor non-pangan seperti sektor perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (Saragih, 2014). Selain itu, pada penelitian lainnya Saragih menyimpulkan kalau Pemerintah pusat dan DIY harus terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi penduduk miskin di wilayahnya dengan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan peluang usaha bagi orang miskin, dan meningkatkan anggaran negara dan daerah (Saragih, 2015). Pemerintah juga perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tingkat

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

pendidikan, serta memperbanyak kesempatan kerja di Yogyakarta guna menurunkan tingkat kemiskinan (Putra, 2023).

Penelitian-penelitian tersebut memang berhasil memperlihatkan kondisi kemiskinan yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Meskipun begitu, penelitian-penelitian tersebut masih memiliki keterbatasan karena belum sepenuhnya menjelaskan keunikan kondisi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan konsep kemiskinan seperti yang ada pada data BPS. Sehingga, fokus penelitian ini yaitu pada upaya untuk memotret keunikan kondisi kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Data yang dihasilkan BPS ini cukup menarik karena pada saat yang sama Provinsi DIY mendapatkan kategori sebagai provinsi termiskin di Pulau Jawa, namun juga masuk sebagai salah satu provinsi dengan indeks kebahagiaan tinggi dan angka harapan hidup tertinggi di Indonesia. Indeks kebahagiaan diukur berdasarkan pada tiga dimensi. Pertama, dimensi kepuasan hidup, yang masih dibagi menjadi dua subdimensi, yaitu kepuasan hidup personal dan sosial. Kedua, dimensi perasaan atau afeksi. Ketiga, dimensi makna hidup.

Dimensi kepuasan hidup dicatat memiliki nilai paling tinggi dalam Indeks Kebahagiaan Yogyakarta 2021, yaitu angkanya mencapai 74,51. Sementara untuk dimensi perasaan atau afeksi, memiliki nilai sebesar 67,29 dan dimensi makna hidup sebesar 72,86. Nilai dimensi kepuasan hidup yang tinggi didorong oleh subdimensi kepuasan hidup sosial yang sebesar 79,64. Kepuasan hidup sosial mencakup pada keharmonisan keluarga, ketersediaan waktu luang, hubungan sosial dan keadaan lingkungan, serta kondisi keamanan. Bisa saja nilai pada subdimensi ini menjadi tinggi dikarenakan warga Yogyakarta yang menerapkan budaya Jawa *nrimo*. Budaya *nrimo* membuat warga dapat menerima pendapat orang lain secara hormat untuk mengurangi potensi terjadinya konflik. Selanjutnya, kepuasan hidup personal meliputi pendidikan, pekerjaan, pendapatan, kesehatan, serta fasilitas rumah yang nilainya mencapai 69,38. Secara umum, indikator-indikator pada subdimensi ini bisa diukur dengan menggunakan data demografi Yogyakarta.

Peringkat Yogyakarta yang rendah pada sektor tenaga kerja dan ekonomi, ternyata berbanding terbalik dengan kualitas hidup masyarakatnya. Berdasarkan Indeks Kebahagiaan yang dikeluarkan BPS, Yogyakarta mendapatkan predikat sebagai provinsi yang paling bahagia se-Indonesia. Angka harapan hidup DIY bahkan

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

tertinggi, yaitu 74 tahun, di atas rata-rata nasional 71 tahun. Hal ini menjadikan Provinsi DIY menjadi "Provinsi Tertua" di Indonesia. (Gambar 2)

Gambar 2. Provinsi DIY sebagai "Provinsi Tertua" di Indonesia

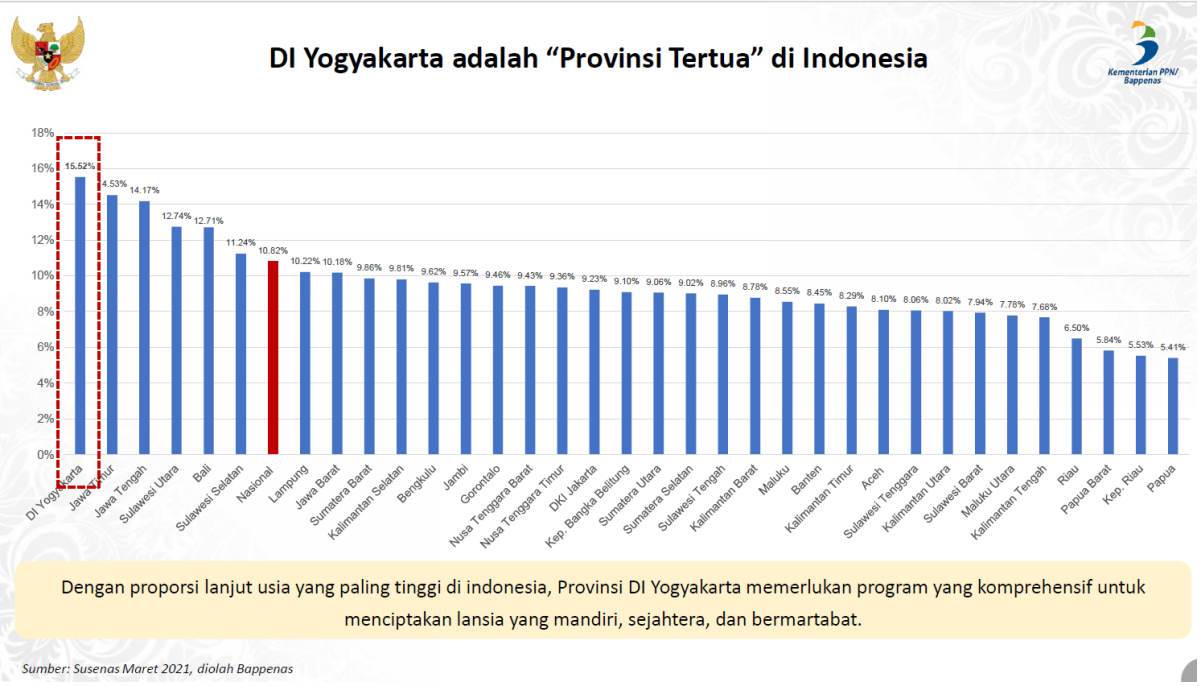

(Sumber: Susenas Bappenas, 2021)

Fenomena yang tampak berbanding terbalik ini dimana di satu sisi tingkat kemiskinan tinggi tapi di sisi lain ternyata tingkat kebahagiaan tinggi, menjadi permasalahan yang menarik untuk diteliti. Ini menarik untuk diperhatikan dan sekaligus memberikan bukti penting bahwa kemiskinan di Indonesia, termasuk di DIY pada dasarnya bersifat multidimensi. Oleh karena itu, melihat kemiskinan dari sisi agregat ekonomi harus dikombinasikan dengan indikator lain yang bersifat nonekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan, kenapa fenomena tersebut bisa terjadi, sekaligus mengkritisi data yang dilangsir BPS tentang kemiskinan yang terjadi di Provinsi DIY.

B. METODE

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2012), penelitian kualitatif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik. Namun, pendekatan deskriptif analisis digunakan untuk menggambarkan masalah kemiskinan penduduk DIY dengan mengacu pada kriteria dan ukuran kemiskinan serta teori kemiskinan. Teknik

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan metode konten analisis yang dicross check dari beberapa dokumen dari berbagai sumber. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang berasal dari bahan-bahan literatur yang relevan. Data yang dicermati yaitu terkait rilis data yang dipublikasikan oleh BPS dan data dari sumber lain.

Analisis data akan dilakukan dengan menggunakan analisis interaktif. Analisis data ini tidak dilakukan secara terpisah dengan pengumpulan data, tetapi merupakan kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Selama pengumpulan data, Miles & Huberman menjelaskan bahwa peneliti bergerak secara interaktif dalam komponen-komponen analisis yaitu reduksi data, sajian data, dan simpulan akhir/verifikasi (Rohmadi & Nasucha, 2015).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Angka Kemiskinan di Provinsi DIY

Berdasarkan seluruh kabupaten dan kota yang ada di DIY, Kabupaten Kulonprogo memiliki tingkat kemiskinan tertinggi di tahun 2022 dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 72.210 jiwa yang merupakan 16,39 persen dari total jumlah penduduknya. Kemudian disusul Kabupaten Gunung Kidul di angka 15,86 dengan jumlah 122.820. Kabupaten Bantul berada di urutan ketiga dengan jumlah 130.130 atau 12,27 persen, Kabupaten Sleman di ururtan berikutnya dengan jumlah penduduk miskin sebesar 98.920 orang, atau sebesar 7,74 persen dari jumlah seluruh penduduknya. Kota Yogyakarta di angka 26.680 atau 6,62 persen berada di uratan terakhir atau kelima (BPS DIY, 2012). Dengan rerata di seluruh kabupaten kota yang berada di wilayah Provinsi DIY tersebut, jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY mencapai 453,76 orang atau 11,34 persen dari total penduduknya, dan menjadi provinsi dengan angka kemiskinan yang paling tinggi di antara seluruh provinsi di Pulau Jawa (Kompas, 2023).

Tabel 2. Sebaran Penduduk Miskin di DIY Berdasarkan Kabupaten Kota BPS 2022

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (satuan ribu jiwa)	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
1.	Yogyakarta	26,68	6,62
2.	Sleman	98,92	7,74

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

3.	Bantul	130,13	12,27
4.	Kulonprogo	72,21	16,39
5.	Gunungkidul	122,82	15,86
	DIY	453,76	11,34

(Sumber: BPS)

Angka-angka tersebut memang benar, akan tetapi penelitian ini menemukan fenomena menarik di balik angka-angka tersebut. Antara lain adalah:

Indikator pengukuran BPS tidak berdasarkan pendapatan per kapita

Dalam menetukan kemiskinan, BPS menghitung bukan pada pendapatan per kapita, tapi pengeluaran per kapita. Definisi miskin adalah ketika seorang individu pengeluarannya setiap bulan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan dasar minimum, baik berupa makanan maupun non makanan rata-rata di bawah garis kemiskinan.

Apa yang dilakukan BPS tidak salah, karena memang indikatornya yang dipakai untuk mengukur tingkat kemiskinan. Masalahnya kemudian, indikator yang melihat kemiskinan hanya dari satu sisi saja yaitu tingkat pengeluaran, ternyata tidak mampu memotret secara keseluruhan kondisi masyarakat Provinsi DIY.

Hal pertama yang tidak bisa teridentifikasi oleh statistik adalah pola konsumsi masyarakat DIY cenderung sederhana, bahkan bisa dikatakan unik, yang relatif berbeda dibandingkan daerah lain. Metode pengukuran statistik belum sepenuhnya bisa menggambarkan *purchasing power parity* masyarakat DIY yang sebenarnya. Metode yang dipakai BPS tidak mampu menggambarkan bagaimana misalnya, penduduk Provinsi DIY memenuhi kebutuhan makanan mereka dari hasil panen yang mereka hasilkan sendiri tanpa harus membeli (Wawancara dengan Baskoro Aji, Sekda DIY, 7 Februari 2023)

Mayoritas masyarakat DIY memiliki budaya yang kuat dalam menabung dibandingkan dengan konsumsi (Wawancara dengan Budiharto Setyawan, BI DIY, 23 Januari 2023) adalah hal kedua yang juga tidak terindentifikasi oleh statistik. Hal ini tercermin dari fakta bahwa tingkat simpanan masyarakat di bank selalu lebih besar daripada tingkat kredit. Secara rata-rata rasio kredit dibandingkan dengan simpanan (*Loan to Deposit Ratio/LDR*) rumah tangga di Provinsi DIY dalam 10 tahun terakhir yaitu berkisar pada 66,78 persen. Hal tersebut memiliki arti kalau dibandingkan dengan rasio ideal 80 persen-90 persen. Artinya, dilihat dari prespektif pengukuran

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

tingkat kemiskinan, masyarakat Provinsi DIY hanya membelanjakan 66,78 persen dari pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, jauh dibawa rasio ideal menurut indikator kemiskinan yang dipakai oleh BPS yaitu sebesar 80 persen-90 persen.

Akhirnya, masyarakat Provinsi DIY dikategorikan sebagai masyarakat miskin karena perspektifnya hanya dari pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap bulan. Kondisi ini terus menjadi masalah secara statistik karena penduduk dianggap miskin jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, semakin rendah pengeluaran per kapita, semakin dekat penduduk dengan kemiskinan. Padahal faktanya, rendahkan pengeluaran masyarakat di Provinsi DIY untuk kebutuhan dasar mereka baik yang merupakan makanan maupun non makanan, bukan karena mereka tidak mampu, tetapi lebih karena mereka lebih suka menabung daripada membelanjakan uangnya, di samping mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar yang merupakan makanan dari hasil pertanian dan perkebunan mereka sendiri sehingga tidak perlu lagi membelinya. Fenomena inilah yang tidak mampu dibaca statistik yang hanya mempergunakan satu sisi penilaian yaitu dari perspektif pengeluaran.

Kesenjangan di Provinsi DIY

Ketimpangan ekonomi selalu menjadi salah satu masalah utama yang selalu dibahas oleh berbagai pejabat kebijakan di negara ini. Setiap upaya untuk menghilangkan ketimpangan ekonomi di Indonesia menghadapi banyak tantangan, termasuk wilayah yang terlalu luas, populasi yang banyak, dan ras yang sangat beragam. Angka gini, juga dikenal sebagai indeks gini, adalah angka yang digunakan untuk mengukur perbedaan antara pendapatan dan kekayaan di antara provinsi di Indonesia. Angka gini biasanya digunakan untuk menunjukkan tingkat kesenjangan pendapatan dan kekayaan di suatu wilayah.

Data lain yang juga dilansir BPS adalah tingginya angka kesenjangan di Provinsi DIY. Kesenjangan pengeluaran dianggap menjadi salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan di DIY menjadi tinggi. Hal tersebut tercermin dari tingkat gini ratio DIY yang mencapai 0,449 (Gambar 3), tertinggi se-Indonesia (Tabel 3)

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

Gambar 3. Indeks Gini Provinsi DIY

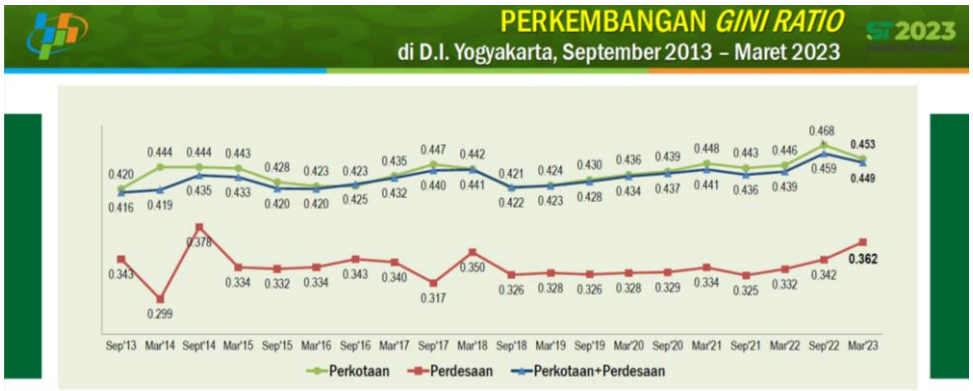

(Sumber: BPS)

Tabel 3. Provinsi dengan Indeks Gini Tertinggi di Indonesia BPS 2022

No.	PROVINSI	INDEKS GINI (PERSEN)
1	Daerah Istimewa Yogyakarta	0,44
2	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	0,42
3	Gorontalo	0,41
4	Jawa Barat	0,41
5	Papua	0,40

(Sumber: BPS)

Data yang dikumpulkan dari wawancara dengan Sekda DIY menunjukkan bahwa perbedaan pendapatan antara penduduk lokal dan pendatang sangat besar. Sebagian besar perbedaan pengeluaran ini difokuskan pada produk tersier: makanan jadi, sewa rumah, dan barang gaya hidup seperti perawatan kecantikan dan kesehatan. Salah satu penyebab ketimpangan yang tinggi di Provinsi DIY adalah ketimpangan pengeluaran ini. (Gambar 4)

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

Gambar 4, Kesenjangan di Provinsi DIY

Distribusi Pengeluaran Penduduk per Kapita dan *Gini Ratio* di Daerah Istimewa Yogyakarta, Maret 2022 – Maret 2023

Daerah	Periode	Kriteria Bank Dunia			*Gini Ratio*
		Penduduk 40% Terbawah	Penduduk 40% Menengah	Penduduk 20% Teratas	
Perkotaan	Maret 2022	15,53	32,11	52,36	0,446
	September 2022	14,91	30,40	54,69	0,468
	Maret 2023	15,21	31,43	53,36	0,453
Perdesaan	Maret 2022	20,88	36,34	42,78	0,332
	September 2022	20,42	35,58	44,00	0,342
	Maret 2023	19,76	34,59	45,65	0,362
Perkotaan + Perdesaan	Maret 2022	16,07	32,32	51,61	0,439
	September 2022	15,54	30,69	53,77	0,459
	Maret 2023	15,58	31,68	52,74	0,449

(Sumber: BPS)

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam melihat kemiskinan di DIY secara objektif secara multi dimensi sebaiknya tidak hanya berdasarkan satu aspek indikator pengukuran saja. Hal ini dibuktikan bahwa perspektif tunggal yang dipakai oleh BPS dalam mengukur tingkat kemiskinan di Provinsi DIY yaitu tingkat konsumsi atau pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar makanan dan non makanan, tidak mampu menggambarkan secara masif kondisi riil dari wilayah tersebut.

Keterbatasan penelitian ini adalah ketidakmampuannya untuk menganalisis lebih luas fenomena-fenomena lain dan melakukan perbandingan dengan daerah-daerah selain Provinsi DIY karena keterbatasan waktu. Sehingga saran untuk penelitian selanjutnya adalah penelitian dilakukan di berbagai wilayah dengan fenomena yang lebih beragam.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian dkk, Peramalan Garis Kemiskinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menggunakan Metode Double Exponential Smoothing, Lebesgue Vol. 3, No. 2, Agustus 2022, 338-343

BPS, Berita Resmi Statistik 2024

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

BPS, Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024

Firdausy, Carunia M., (2012), *Konsep Dan Ukuran Kemiskinan Alternatif*, Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

Hendra, Roy, (2010). Determinan Kemiskinan. Jakarta: Fakultas Ekonomi-UI.

Khoirudin, Rifki, dan Muhammad Safar Nasir, Determinan Kemiskinan Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2019, COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Volume 5 Nomor 2, Januari-Juni 2022, 1407-1422

Kuncoro, Mudrajad, (2004), *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi Dan Peluang*, Jakarta: Erlangga.

Moleong, Lexy. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Nurkse, R. (1964). *Masalah Pembentukan Modal di Negara-Negara jang Sedang Membangun*. Jakarta: Bhratara.

Pratama, Y. C. (2014). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Esensi*, Volume (4) No. 2

Prayitno, Ujianto S., (2010), Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Melalui Pengembangan Sektor Informal: Kasus Yogyakarta dalam *Buku Pembangunan Sosial*, Jakarta: P3DI Setjen DPR RI.

Putra, Alfath Rizanda dan Suharto, Determinan Kemiskinan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Volume 2 Issue 2, 2023: 143-148

Rohmadi, M., & Nasucha, Y. (2015). *Dasar-Dasar Penelitian*. Surakarta: Pustaka Briliant.

Salsabilla, Ayu, dkk, Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, Jurnal IKRAITH-EKONOMIKA No 2 Vol 5 Juli 2022, 96-105

Saragih, Juli Panglima, Faktor Penyebab Dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menghapus Kemiskinan, *JESP-Vol. 6, No 2 Nopember 2014,* 139-155

Saragih, Juli Panglima**,** Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta**,** Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6 No. 1, Juni 2015, 45 – 59

ISSN 2087-8923
e-ISSN 2549-9319

Sukirno, Sadono, (1985), *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, Dan Dasar Kebijakan,* Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI.

Todaro, Michael P., (1983), *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.

Sumber Digital

World Bank. (2020). Mengurangi kemiskinan. Diperoleh tanggal 14 Juli 2024, dari http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/reducingpoverty.pdf.